



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII DAN
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
KE BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TANGGAL 6 – 8 NOVEMBER 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023**



**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII DAN
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
KE BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TANGGAL 6 – 8 NOVEMBER 2023**

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pada tanggal 6 sd. 8 November 2023 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 – 2024 Komisi VI DPR RI, melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) ke Bogor Provinsi Jawa Barat. Kunjungan Kerja Spesifik tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau langsung hasil capaian kinerja korporasi PTPN VIII dan Perum Perhutani di Gunung Mas, Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat

Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ini dinilai penting dan strategis dalam rangka mendapatkan penjelasan terkait perkembangan kinerja perusahaan terutama di Provinsi Jawa Barat. Sebab, seperti yang kita ketahui PT Perkebunan Nusantara VIII adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia di bawah *Holding* Perkebunan yang menjalankan berbagai bisnis komoditi penting perkebunan seperti teh, karet, sawit dan Kopi.

Dengan perkebunan teh terbesar dan terluas di Indonesia, perkebunan sawit yang tersebar di dua wilayah Jawa Barat dan Banten, serta perkebunan Karet yang tersebar di wilayah Jawa Barat, PTPN VIII memiliki potensi ekspor

yang besar dan sangat menjanjikan bagi pemasukan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Komisi VI DPR RI menggunakan kesempatan tersebut untuk melihat langsung kinerja Perum Perhutani. Komisi VI DPR RI menilai hal ini juga penting mengingat Perum Perhutani dianggap berperan penting meningkatkan produktivitas sektor kehutanan nasional yang selaras dengan upaya mewujudkan hutan lestari serta melakukan percepatan intergrasi bisnis dari hulu ke hilir.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut Komisi VI DPR RI memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan kepada Perum Perhutani. Utamanya dalam meningkatkan peran dan fungsi mendukung kelestarian hutan nasional, serta kontribusi pada perekonomian di Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan UMKM dalam kegiatan perusahaan.

Secara khusus, Komisi VI DPR RI telah melihat secara langsung sejauh mana upaya perbaikan tata Kelola Perusahaan baik di PTPN VIII maupun di Perum Perhutani terutama dalam menyikapi beberapa permasalahan yang tengah menjadi sorotan Masyarakat, seperti penanganan asset-asset dan lahan yang menjadi subyek konflik dengan masyarakat dan penyelesaian Santunan Hari Tua atau SHT untuk para purna karya baik di Perusahaan maupun di anak usaha. Komisi VI DPR RI juga telah mendapat penjelasan langsung dari Direksi PTPN VIII dan Perum Perhutani serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik ini.

Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dimana DPR RI dapat mengadakan Kunjungan Kerja sesuai bidangnya.

B. Objek Kunjungan Kerja

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI pada tanggal 6 – 8 November 2023 adalah PTPN VIII dan Perum Perhutani di Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 sd. 8 November 2023 adalah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dengan mendengarkan langsung kinerja korporasi PTPN VIII dan Perum Perhutani dari Jajaran Dewan Direksi yang berlangsung di Gunung Mas, Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Dalam Kunspek tersebut Komisi VI DPR RI yang membidangi Koperasi dan UKM, Perdagangan, BUMN, dan Investasi telah tuntas melakukan tatap muka dengan berbagai pihak sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Guna mendapatkan gambaran sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan Kerja tersebut di atas, Komisi VI DPR RI dari tanggal 6 sd. 8 November 2023 melakukan tatap muka yang berlangsung di Gunung Mas, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan data-data sebagai bahan awal Kunjungan Kerja Spesifik ini,

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Gunung Mas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-33	FAISOL RIZA, S.S	PIMP. / F-PKB
2.	A-189	ARIA BIMA	PIMP. / F-PDIP
3.	A318	M. SARMUJI, S.E., M.Si	PIMP. / F-PGOLKAR
4.	A-229	ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.	F.PDIP
5.	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F.PDIP
6.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.	F.PDIP
7.	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
8.	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.	F.PG
9.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.PG
10.	A-311	DONI AKBAR, S.E., M.M.	F.PG
11.	A-302	NUSRON WAHID	F.PG
12.	A-115	KHILMI	F.PGERINDRA
13.	A-361	ZURISTYO FIRMA DATA, S.E., M.M.	F.NASDEM
14.	A-374	H. SUBARDI, S.H., M.H.	F.NASDEM
15.	A-36	Ir. H. M. NASIM KHAN	F.PKB
16.	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
17.	A-40	H. ALI AHMAD	F.PKB
18.	A-523	MUSLIM, S.HI., M.M.	F.PD
19.	A-447	AMIN A.K., M.M.	F.PKS
20.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
21.	A-485	Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.	F.PAN
22.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos.	F.PAN
23.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

2. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE PROVINSI JAWA BARAT

Hasil kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Komisi VI DPR RI menyoroti beberapa hal penting yang berhubungan dengan kinerja perusahaan serta memberi masukan seperti yang disampaikan di bawah ini:

PTPN VIII

Hingga bulan November 2023, PTPN VIII masih melanjutkan program transformasi keuangan dengan skema *repackaging* dalam kerangka integrasi PTPN Group yang bertujuan agar PTPN memberikan manfaat lebih optimal bagi Indonesia yaitu:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan mengurangi impor gula & peningkatan produksi minyak goreng;

3. Mendukung program peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mengurangi ketergantungan impor energi;
4. Mendukung agenda ESG dari Pemerintah;
5. Mendorong program hilirisasi;
6. Peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak & deviden.

Bagi PTPN VIII, dengan adanya integrasi BUMN perkebunan diharapkan mampu mendorong pengembangan bisnis hilirisasi dan meningkatkan produksi minyak goreng dan gula serta mengembangkan kapasitas produksi biodiesel/FAME3. Selain itu diharapkan Integrasi PTPN juga dapat berdampak pada kinerja PTPN VIII antara lain:

1. Meningkatkan kinerja Perusahaan termasuk diantaranya;
 - Meningkatkan efisiensi Perusahaan;
 - Meningkatkan *value discovery asset*;
 - Maksimalisasi nilai dengan peningkatan EBITDA
 - Meningkatkan fokus bisnis pada komoditas utama
2. Dalam paparannya tersebut, Komisi VI DPR memberikan apresiasi atas Upaya perbaikan kinerja BUMN Perkebunan khususnya PTPN VIII namun secara khusus, Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI memberikan saran dan masukan sebagai berikut:
 1. Komoditas yang Ada di PTPN VIII masih bisa diandalkan sebagai *Core Business (Bisnis Inti)* dan dapat dikembangkan lebih cepat dan tepat guna dengan teknologi dan industrialisasi. Bahkan jika dilakukan dengan lebih serius, PTPN VIII dibawah *Holding Perkebunan* yang menjalankan berbagai bisnis komoditi perkebunan seperti teh, karet, sawit dan kopi yang memiliki potensi ekspor yang besar dan sangat menjanjikan bagi pemasukan negara dan kesejahteraan masyarakat;
 2. Walaupun asset-asset milik negara yang dikelola PTPN VIII bisa dijadikan pendapatan Perusahaan untuk pengembangan pariwisata dan area industri, namun *Core Business* PTPN VIII harus tetap fokus ke *green gold* pertanian dan perkebunan yang ditopang oleh *post harvest integrated industrial*;
 3. Hal ini penting untuk dijalankan dan menjadi catatan Tim Kunspek Komisi VI

DPR RI mengingat kondisi PTPN VIII yang riil saat ini hanya 6% dari 94% total produksi yang telah menerapkan hilirisasi bahan baku seperti pengeringan dan pengemasan produk dari pohon teh. Tingkat hilirisasi produk-produk perkebunan milik PTPN VIII dinilai sangat minim dibandingkan asset yang dikelolanya.

4. Komisi VI DPR RI mendorong industrialisasi hasil teh yang berasal dari perkebunan PTPN VIII. Salah satu caranya melalui sinergi BUMN yang digalakan oleh Kementerian BUMN. Sebagai contoh, PTPN VIII dapat berkoordinasi dengan hotel-hotel milik BUMN menyajikan produk teh berkualitas tinggi dari PTPN VIII seperti Walini. Hal ini dinilai penting untuk mendorong percepatan hilirisasi di sektor perkebunan agar mencapai minimal 50% di tahun 2024 ini. Temuan Komisi VI DPR RI, saat ini PTPN VIII dinilai hanya memasok kebutuhan bahan baku daun teh pabrik-pabrik teh swasta.
5. Dengan asset Perusahaan yang dikelola dan didukung oleh kecakapan sumberdaya manusianya, Komisi VI DPR RI berharap Tahun 2024 PTPN VIII Bisa Lebih Agresif dan Hasilkan Laba
6. Tim Kunspek Komisi VI DPR RI menilai PTPN VIII perlu melakukan optimalisasi *asset* lahan perkebunan dengan tetap memperhatikan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) sehingga, *asset* yang sudah dimiliki ratusan tahun ini tetap terjaga dan bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat serta membawa perusahaan menjadi Perusahaan yang menguntungkan (saat ini kondisi keuangan merugi). Untuk itu PTPN VIII perlu melakukan mitigasi terjadinya konflik sosial akibat sengketa lahan antara Perusahaan dengan penduduk di sekitar lahan kebun Perusahaan.

Perum Perhutani

Berdasarkan pendalaman saat Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Direksi Perum Perhutani, Tim Kunspek Komisi VI DPR RI menyatakan harapannya agar Perum Perhutani menggunakan teknologi tepat guna dan mampu berkembang ke arah Industrialisasi hasil hutan tanpa mengesampingkan kelestarian hutan. Beberapa saran dan masukan yang disampaikan saat

pendalaman antara lain:

1. Perum Perhutani tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan sektor-sektor yang sekedar menebang dan menjual kayu karena hal itu tidak akan mendapatkan *value added* bagi perusahaan dan negara;
2. Walaupun disampaikan dalam paparan Direksi Perum Perhutani dari keuntungan perhutani sudah menyetorkan dividen Rp100 miliar (2023) dari pengelolaan lahan yang diberikan negara kepada Perusahaan, namun Perum Perhutani diminta untuk terus berinovasi dan berupaya meningkatkan kinerja Perusahaan mengingat lahan dan potensi kandungan yang ada di dalamnya sangat berharga dan tersebar diseluruh Indonesia. Untuk itu, Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani tidak hanya sekedar mengandalkan menebang dan menjual hasil hutan namun dengan kemajuan teknologi bisa meningkatkan nilai tambah produk misalnya bagaimana Perum Perhutani berperan mendukung ekspor furniture;
3. Komisi VI DPR RI menyampaikan harapannya agar Perum Perhutani bisa berperan sebagai terminal bahan baku untuk memasok berbagai kebutuhan industri-industri per kayu nasional, tanpa mengabaikan kelestarian hutan. Diharapkan dengan strategi itu Perum perhutani dapat membuka lapangan kerja bagi generasi muda Indonesia, yang bersinggungan dengan lahan dan kinerja perhutani sehingga pengembangan hilirisasi bisa dirasakan manfaatnya ke bidang lain;
4. Tim Kunspek Komisi VI DPR RI mendukung pengembangan unit pariwisata yang terdapat di lahan-lahan milik Perhutani tanpa mengabaikan *Core Business* dari Perum Perhutani;
5. Sama halnya dengan PTPN VIII, Tim Kunspek Komisi VI DPR RI menilai Perum Perhutani perlu melakukan optimalisasi asset dengan tetap memperhatikan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) sehingga, asset yang sudah dimiliki ratusan tahun ini tetap terjaga dan bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat serta membawa perusahaan menjadi Perusahaan yang memberikan manfaat terutama bagi Masyarakat desa di sekitar hutan yang dikelola Perum Perhutani. Untuk itu Perum perhutani perlu melakukan mitigasi

terjadinya konflik sosial akibat sengketa lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat termasuk mengatur tata kelola penggunaan sumber daya mineral dan tambang yang berada di area Hutan Kelola Perhutani.

Pada kesempatan tersebut, Direksi PTPN VIII memberikan pemaparan dihadapan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:





Daftar Pertanyaan



1. Bagaimana kondisi keuangan Perusahaan hingga November 2023 ini dan mohon kiranya dijelaskan apa Bisnis Inti/Core Business dari PTPN VIII serta bagaimana prospek ke depan?
2. Berapa persentase rasio asset dengan keuntungan kotor? (agar dilampirkan audited laporan Rugi Laba Perusahaan dan Current Asset Ratio)
3. Berapa Liabilities (kewajiban Perusahaan) kepada pihak ketiga (Bank, Investor dan Vendor) per tanggal 1 November 2023?
4. Berapa piutang PTPN VIII di pemerintah yang tercatat hingga tahun 2023 ini? Apakah berdampak pada kinerja keuangan?
5. Jika dibanding besar dan luasnya asset lahan yang dikuasai PTPN VIII di Provinsi Jawa Barat dan Banten, mengapa penyerapan tenaga kerja lokal di Perusahaan dan anak usaha relatif sangat minim? Apa upaya memperbesar serapan tenaga kerja lokal agar manfaat keberadaan BUMN PTPN VIII di Jawa Barat bisa lebih dirasakan masyarakat terutama di Jawa Barat?
6. Masih terkait dengan kesejahteraan karyawan, Bagaimana progress penyelesaian Santunan Hari Tua pensiunan karyawan PTPN VIII?
7. Bagaimana tanggapan PTPN VIII atas tuntutan Solidaritas Purna Karya Anak Perusahaan Holding Perkebunan PTPN (Sapaham Sahati) yang menuntut Santunan Hari Tua atau SHT untuk sekitar 5000 orang yang disebut bernilai Rp 360 miliar untuk segera dibayarkan?
8. Agar dijelaskan mengingat Karyawan adalah asset berharga Perusahaan, apa saja upaya yang telah dilakukan PTPN VIII dalam pengembangan dan karir karyawan? Apa ada strategi khusus?

Activate
Go to Setting

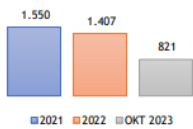


Q & A...(1/8)

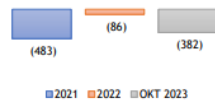
Komis VI DPR RI

Q | Bagaimana kondisi keuangan Perusahaan hingga November 2023 ini dan mohon kiranya dijelaskan apa Bisnis Inti/Core Business dari PTPN VIII serta bagaimana prospek ke depan?

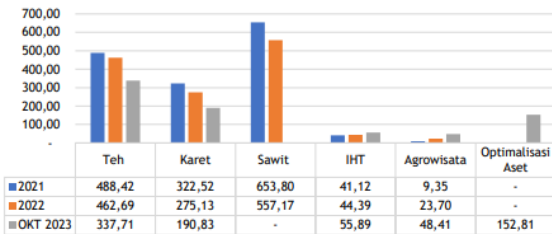
Sales (Rp Miliar)



Laba (Rugi) Korporasi (Rp Miliar)



Sales Per Segmen (Rp Miliar)

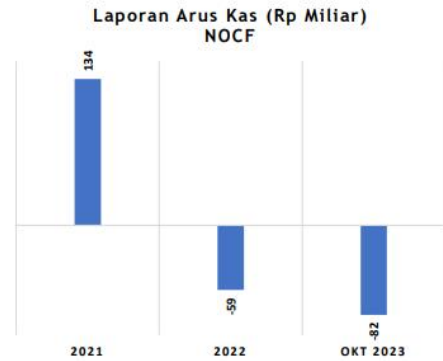


Key Highlights

- ✓ Tren Sales menurun sehubungan dengan komoditi kelapa sawit mulai KSO dengan PTPN III (Persero) per 1 Oktober 2022.
- ✓ Laba rugi tahun 2021 termasuk penurunan nilai PI sebesar 92 M serta *impairment* Karet dan Teh sebesar 137 M, sedangkan tahun 2022 termasuk kenaikan PI sebesar 685 M serta *impairment* Karet dan Teh sebesar 346 M.
- ✓ Agrowisata, IHT, dan Optimalisasi Aset menjadi sumber *revenue streams*
- ✓ Program Optimalisasi Aset di antaranya untuk Pengembangan Kawasan Industri, Walini, Agrowisata, dan lain - lain
- ✓ Penguatan Hilirisasi dengan membuat diversifikasi produk seperti *syrup tea, effervescent tea, collagent tea*, dll.
- ✓ Pengembangan Agrowisata untuk Resort, Berbagai Wahana Baru, dan lain - lain
- ✓ Program Strategic yang telah dan dalam proses di antaranya konversi *renewable energy* dan decarbonisasi.

Activate
Go to Setting

Q Bagaimana kondisi keuangan Perusahaan hingga November 2023 ini dan mohon kiranya dijelaskan apa Bisnis Inti/Core Business dari PTPN VIII serta bagaimana prospek ke depan?

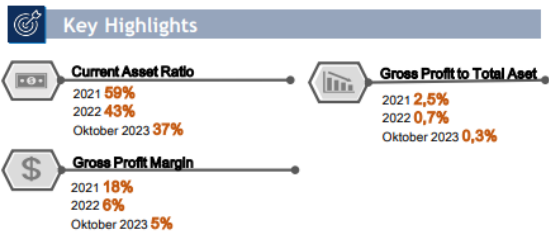


✓ Pada tahun 2022 terjadi perbaikan Pabrik Kelapa Sawit (eksploitasi) dan pembayaran pupuk.

Activate
Go to Setting

Q Berapa persentase rasio asset dengan keuntungan kotor? (agar dilampirkan audited laporan Rugi Laba Perusahaan dan Current Asset Ratio)...

DESCRIPTION	UNIT	2021 (AUDITED) REAL	2022 (AUDITED) REAL	OKTOBER 2023 REAL
Revenue	In Rp Bn.	1.550	1.407	821
COGS	In Rp Bn.	1.278	1.327	783
Gross Margin	In Rp Bn.	272	80	38
Selling, General, and Administration Expense	In Rp Bn.	442	417	267
Sales & Marketing	In Rp Bn.	48	50	32
General & Administration	In Rp Bn.	394	367	235
Beban Gaji		105	134	
Beban Imbalan Kerja		165	142	
Beban Lainnya		123	92	
EBIT From Operations	In Rp Bn.	(170)	(337)	(229)
Other Operating Income / Expense	In Rp Bn.	(185)	360	8
Income/Loss from biological Asset Charges	In Rp Bn.	18	4	-
Other Operating Income	In Rp Bn.	104	812	34
Other Operating Expense	In Rp Bn.	271	448	25
Earning Before Interest and Tax (EBIT)	In Rp Bn.	(355)	23	(220)
Other Income / Expense	In Rp Bn.			
Finance (Interest, Dividend, etc) Income	In Rp Bn.	20	2	1
Finance (Interest) Expense	In Rp Bn.	139	113	162
Earning Before Tax	In Rp Bn.	(473)	(88)	(382)
Tax	In Rp Bn.	(10)	2	-
Earning After Tax	In Rp Bn.	(483)	(86)	(382)



✓ Penurunan *current ratio* disebabkan ketidaktercapaian produksi untuk komoditi Karet dan Teh serta stagnannya harga jual komoditi.

✓ Tahun 2022 melakukan penjualan persediaan teh di masa lalu yang memiliki harga relative rendah

Activate
Go to Setting

The original consolidated financial statements included herein are all in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 Year Ended December 31, 2022
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN	1.407.292.382.299		1.550.441.522.544	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.327.359.906.464)	27	(1.278.487.574.223)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	79.932.475.835		271.953.948.321	GROSS PROFIT
Perubahan nilai wajar aset biologis	(3.973.965.222)		(18.167.941.540)	Changes in fair value of biological asset
Beban pemasaran dan penjualan	(49.646.324.557)	26	(48.222.922.093)	Marketing and selling expenses
Beban umum dan administrasi	(366.975.002.850)	29	(393.639.758.527)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain	811.630.347.859	30	97.109.023.126	Other operating income
Beban operasi lain	(447.746.543.555)	31	(263.839.900.266)	Other operating expenses
LABA (RUGI) USAHA	23.220.987.510		(354.806.550.979)	OPERATING LOSS
Pendapatan yang dikenakan pajak final	2.236.798.810	32	20.035.923.127	Income related to final tax
Beban pajak final	(434.996.756)		(205.101.292)	Final tax expenses
Beban keuangan	(113.051.983.080)	32	(138.509.976.666)	Finance expenses
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(88.029.195.516)		(473.485.705.810)	LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Manfaat (beban) pajak penghasilan	1.696.043.446	19c	(9.503.669.617)	Income tax benefit (expense)
RUGI TAHUN BERJALAN	(86.333.152.070)		(482.989.376.427)	LOSS FOR THE YEAR

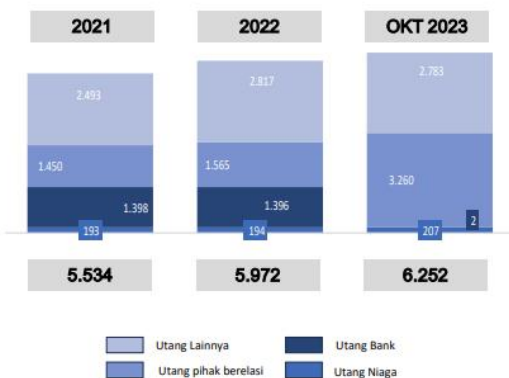


Activate
Go to Setting

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Q |

Berapa Liabilities (kewajiban Perusahaan) kepada pihak ketiga (Bank, Investor dan Vendor) per tanggal 1 November 2023...?



Key Highlights

- Atas kelanjutan program transformasi keuangan dengan skema **repackaging** dalam rangka integrasi PTPN Group, dalam hal ini Utang kepada Perbankan beralih ke Pihak Berelasi PTPN IV dan PTPN VII.

Activate
Go to Setting

Q Berapa piutang PTPN VIII di pemerintah yang tercatat hingga tahun 2023 ini? Apakah berdampak pada kinerja keuangan...?

No	Objek	Process/Status	Nilai
1	Bendungan Karian Tahap 1 (Konsinyasi) Luas : 310.00 M2 Lokasi : Kebun Cisolak Baru, Banten	1. Putusan Pengadilan sebelumnya (NO= gugatan tidak diterima) sehingga kepemilikan aset belum bisa menyatakan kepemilikan lahan tersebut milik siapa, jadi uang konsinyasi belum bisa diambil oleh PTPN VIII. 2. Dalam proses pemenuhan dokumen tanah dan mediasi tahap 2 oleh Tim Agraria dan Legal Corp dengan BPN, belum terdapat <i>feedback</i> dari BPN.	10.869.214.000
	Bendungan Karian Tahap 2 (Tambahn Areal) Luas : 40.000 M2 Lokasi: Kebun Cisolak Baru, Banten	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Hasil Apraisal KJPP Sih Wiryadi dan Rekan dalam Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Bendungan Karian B Kebun Cisolak Baru	3.000.000.000
2	Ali Nyemen Luas : 21.186 M2 Lokasi: Kebun Ciater Peruntukan Jalur Penyelamatan	Sudah disampaikan surat kepada Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat nomor: SB/II.2/4234/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Uang Ganti Rugi atas Pembangunan Jalur Penyelamatan dan Perbaikan badan Ruas jalan Subang - Bandung dan belum memperoleh tanggapan.	6.477.578.750
Total			20.346.792.750

Key Highlights

- ✓ Pembayaran Piutang PTPN VIII dari pemerintahan dapat membantu *cash in* perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional.

Activate
Go to Setting

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

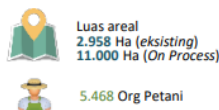
Q Jika dibanding besar dan luasnya asset lahan yang dikuasai PTPN VIII di Provinsi Jawa Barat dan Banten, mengapa penyerapan tenaga kerja lokal di Perusahaan dan anak usaha relatif sangat minim? Apa upaya memperbesar serapan tenaga kerja lokal agar manfaat keberadaan BUMN PTPN VIII di Jawa Barat bisa lebih dirasakan masyarakat terutama di Jawa Barat ...?

Penggunaan Areal PTPN VIII



Program Pemberdayaan Masyarakat Kebun (PMDK)

- Dalam rangka Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa kebun utamanya petani di sekitar lahan perkebunan
- Membuka peluang kerja untuk masyarakat sekitar kebun sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat desa kebun
- Sebagai upaya penangan dan pengamanan lahan kebun



- Komoditi yang ditanam :
- a. Padi Huma
 - b. Padi Sawah
 - c. Jagung
 - d. Sayuran
 - e. Rempah-Rempah
 - f. Sereh Wangi
 - g. Pisang
 - h. Singkong
 - i. Nanas

Key Highlights

- ✓ Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh besarnya luas areal tanaman karena areal tersebut merupakan areal produktif yang efektif dikelola oleh PTPN VIII.
- ✓ Saat ini PTPN VIII sedang menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa kebun (PMDK), dimana sampai dengan bulan oktober 2023 luas areal PMDK yang sudah dikerjasamakan dengan masyarakat sebesar 2.958 ha dengan jumlah 5.468 petani dan sedang dalam proses kerjasama PMDK sebesar 11.000 ha

Activate
Go to Setting

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Q | Masih terkait dengan kesejahteraan karyawan, Bagaimana progress penyelesaian Santunan Hari Tua pensiunan karyawan PTPN VIII?

Santunan Hari Tua Karyawan Pensiunan

Rp. 366,77 M

Saldo SHT yang belum terbayarkan Rp. 366,77 M

Disajikan dalam Juta Rupiah

NO	Tahun	Pembayaran SHT Realisasi	RKAP	Jumlah Penerima	%	Keterangan
1	2016	23.702	57.719	1.907	41%	Sebagian dari pinjaman BNI atas KMK
2	2017	27.986	64.083	1.318	44%	Sebagian dari pinjaman BNI atas KMK
3	2018	64.225	76.126	1.294	84%	Sebagian dari pinjaman DBS atas Penerusan Pinjaman dari PTPN III
4	2019	75.331	75.201	1.379	100%	Sebagian dari uang muka RNI
5	2020	7.358	18.078	1.491	41%	
6	2021	37.575	55.774	1.210	67%	
7	2022	55.303	76.764	980	72%	
8	2023	61.090	65.419	727	93%	Sebagian dari pinjaman ICLA PTPN II
JUMLAH		352.570	489.165	10.306	72%	

Key Highlights

- ✓ PTPN VIII senantiasa mencadangkan Pembayaran SHT setiap tahun dalam anggaran RKAP, pada tahun 2023 pembayaran SHT dianggarkan Rp. 65 Miliar
- ✓ PTPN VIII selalu berkomitmen untuk memenuhi pembayaran SHT disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan melalui skema FIFO (*First in First Out*) dan priority pensiun meninggal.
- ✓ Realisasi pembayaran s.d Oktober 2023 sebesar Rp. 61 Milyar atau 93 % dari RKAP.
- ✓ SHT yang sudah dilakukan pembayaran untuk pensiunan s.d. Mei 2019 (Pembayaran pensiunan bulan Mei diprioritaskan u/ pensiun yg meninggal)

Activate
Go to Settin

Q | Bagaimana tanggapan PTPN VIII atas tuntutan Solidaritas Purna Karya Anak Perusahaan Holding Perkebunan PTPN (Sapaham Sahati) yang menuntut Santunan Hari Tua atau SHT untuk sekitar 5000 orang yang disebut bernilai Rp 360 miliar untuk segera dibayarkan?

Santunan Hari Tua Karyawan Pensiunan

Rp. 366,77 M

Saldo SHT yang belum terbayarkan sebesar Rp. 366,77 M

Key Highlights

- ✓ PTPN VIII akan terus berupaya memenuhi pembayaran SHT melalui skema FIFO (*First in First Out*) dari alokasi pendapatan operasional perusahaan.
- ✓ Sebagai upaya percepatan pemenuhan pembayaran SHT, PTPN VIII telah mencanangkan program disposal aset serpong yang mana hasil pendapatan disposal aset tersebut sebagian akan dialokasikan untuk pemenuhan pembayaran SHT.
- ✓ Pada Tahun 2024 PTPN VIII telah menganggarkan pembayaran SHT yang dialokasikan sebesar 1,5X beban tahun berjalan (Rp. 99 M)

Activate
Go to Settin

Q | Agar dijelaskan mengingat Karyawan adalah asset berharga Perusahaan, apa saja upaya yang telah dilakukan PTPN VIII dalam pengembangan dan karir karyawan? Apa ada strategi khusus?

Strategy Learning and Culture Development

PTPN VIII telah menetapkan berbagai strategi dalam pengembangan kompetensi karyawan yang diharapkan akan memberikan *added value* terhadap perusahaan, upaya-upaya tersebut antar lain :

- ✓ Pemberian saldo *Learning Wallet* yang merata kepada seluruh Karyawan Pimpinan sebagai upaya dalam memberikan kesempatan belajar yang sama kepada karyawan. Pada tahun 2023, telah dianggarkan sebesar 1.035 M dan telah ditingkatkan menjadi 2.54 M atau sebesar 245% untuk anggaran tahun 2024 diluar rencana pengembangan dan pembelajaran lain-lain
- ✓ Pengembangan talenta secara spesifik untuk karyawan dengan kinerja dan kompetensi yang baik, yaitu melalui *Plantation Leadership Development Program (PLDP)* yang sampai saat ini telah diikuti 177 orang, dan akan terus berkelanjutan setiap tahunnya.
- ✓ PTPN VIII juga terus mengupayakan Pendidikan berupa Sertifikasi Profesi pada beberapa jabatan yang membutuhkan, seperti program *Internal Audit Committee Practice, Certified Human Capital Supervisor, Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah, Internal Auditor, dan Manajemen Risiko* sebanyak total 91 orang di tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, telah direncanakan untuk program Ahli K3 Umum, Auditor Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Limbah Udara, Air, B3, *Human Capital*, dan lain sebagainya dengan alokasi peserta sebanyak 113 orang.
- ✓ Dalam rangka peningkatan *operational excellence* maka program-program *learning* difokuskan pada peningkatan *technical competency* karyawan.



Kemudian dilanjutkan oleh Direksi Perum Perhutani memberikan pemaparan sebagai berikut:



ASEAN
INDONESIA
2023



Materi Perum Perhutani Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat pada Masa Persidangan V tahun Sidang 2022-2023



Bandung, 17 Juli 2023

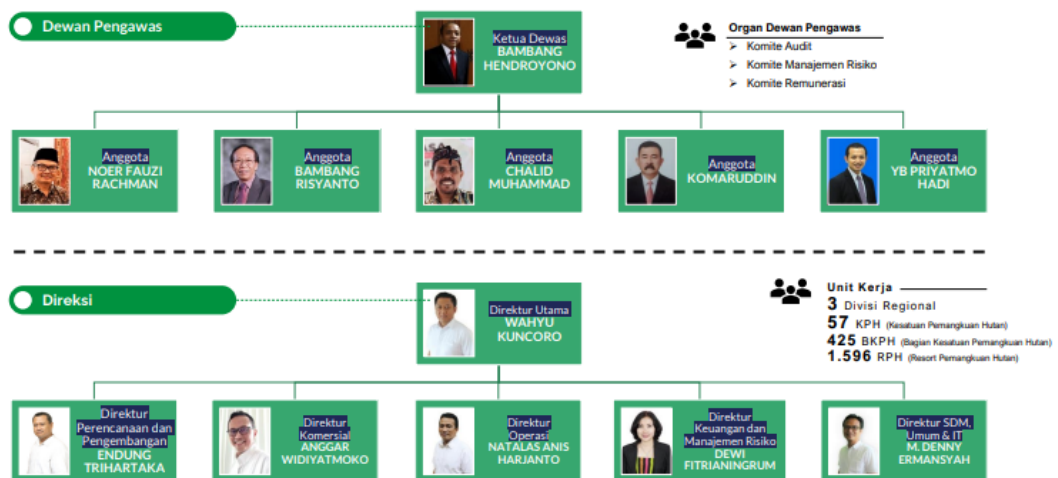


www.perhutani.co.id Perum Perhutani

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



Struktur Organisasi 2023



www.perhutani.co.id Perum Perhutani
AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

#1 Act

Pengelolaan Sumber Daya Hutan oleh Perum Perhutani

A Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani

PP 72 Th.2010
 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Pasal 3 ayat (1)

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menetapkan peraturan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Sabah Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten (selanjutnya disebut sebagai "daerah") yang pengelolaan hutan terdiri dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PP 23 Th. 2021
 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) PP Nomor 72 Th 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

SK Menteri LHK No.SK/73/2021
 tanggal 8 Maret 2021

pengawasan kepada Perum Perhutani untuk mengelola KPH dan KPH di Pulau Jawa, dengan dukungan dan pengawasan perantara pemerintah menggunakan Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Luas areal Kelola Perum Perhutani existing 2,43 juta ha

Penyugian Finansial

- HP → 1.403 P ha / 58%
- HPT → 0.394 P ha / 16%
- HL → 0.637 JI ha / 26%

Seluruh KPH Perhutani (57) telah bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Forest Stewardship Council (FSC)

11 KPH bersertifikat FSC PM (Forest Management)
 46 KPH bersertifikat FSC CW (Controlled Wood)

B Kinerja Operasional

1 Tanaman

Selapa tahun Perhutani melakukan penanaman dengan menyelaraskan luasan tebangan dan rencana rehabilitasi / perbaikan tutupan lahan

2 Tutupan Lahan Perhutani

Dalam kurun waktu 2016 - 2021 Perum Perhutani telah menurunkan luasan areal terbuka dari 711.942 Ha (29%) di tahun 2016 menjadi 608.583 Ha (25%) di tahun 2021 dengan meningkatkan tutupan lahan dari 1.727.986 Ha (71%) di tahun 2016 menjadi 1.828.943 Ha (75%) di tahun 2021

3 Kawasan Perlindungan

Luas kawasan perlindungan / konservasi Perhutani seluas 978.563 ha atau 40,1% dari total areal kelola, meningkat secara terus menerus selama 5 tahun terakhir, total sahan dan fauna dilindungi sesuai Permen LHK No.106/2018 sebanyak 919 jenis dimana 104 jenis atau 11% berada di areal Perhutani.

4 Multipler Effect - Kelola Sosial

Sebagai perwujudan misi "Penuhi kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan (PEOPLE)" dalam menjalankan proses bisnisnya Perum Perhutani terus membudayakan tenaga kerja masyarakat desa hutan

- Serapan Tenaga Kerja Masyarakat Desa Hutan: 925.975 Orang
- Jumlah Desa sekitar areal kerja Perhutani: 5.485 Desa - 5.395 LMDH
- Nilai Ekonomi untuk Masyarakat: Rp 1.480,9 M
- Jumlah anggota LMDH: 1.030.975 Orang

C Kinerja Historikal, Audited 2022 dan RKAP 2023

1 Anus Kas Operasi

2 Anus Kas Investasi

3 Laba Bersih

4 Revenue

5 Audited 2010 - 2022

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Keuntungan Bersih	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Keuntungan Sebelum Pajak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Keuntungan Setelah Pajak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Keuntungan Sebelum Pajak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Keuntungan Setelah Pajak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

6 RKAP 2023

7 RUPP 2020-2024

Sejak 2016-2022 Audited, merupakan Rp. KAP, PNC

Update Proyek Strategis tahun 2023

01 Hutan sosial - Platform Kemitraan Sosial Q1 - Q2 '2023

Nilai Investasi = Rp 1,5 M Dana Sendiri

03 Empowering Anak Perusahaan melalui Spin off bisnis Q2 - Juni 2023

Nilai Investasi = Rp 7 M Dana Sendiri

05 New Factory dan Komersialisasi Produk Biomassa Q3 - September 2023

Nilai Investasi = Rp 112,7 M Dana Sendiri

07 Pengembangan Agroforestry Tebu Kelola Mandiri Q4 - Oktober 2023

Nilai Investasi = Rp 193,1 M Dana Sendiri

09 Implementasi digitalisasi untuk pemataman dan penguatan SDH Q4 - November 2023

Nilai Investasi = Rp 8 M Dana Sendiri

02 Implementasi SMART KPH Q2 Mei - 2023

Nilai Investasi = Rp 8,43 M Dana Sendiri

04 Modernisasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Q2 - Juni 2023

Nilai Investasi = Rp 36 M Dana Sendiri

06 Pengembangan Proyek Nature Base Solutions (NBS) Q4 - Oktober 2023

Nilai Investasi = Rp 5 M Dana Sendiri

08 Digitalisasi Perencanaan SDH Q4 - November 2023

Nilai Investasi = Rp 15,6 M Dana Sendiri

10 Integrasi ERP Perhutani Q4 - Desember 2023

Nilai Investasi = Rp 60 M Dana Sendiri

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



ASEAN
INDONESIA
2023



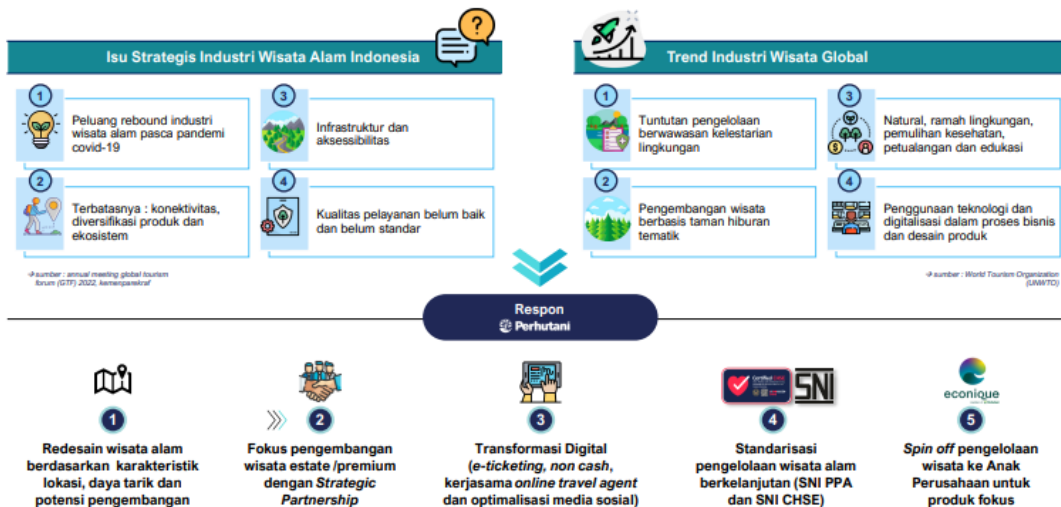
Pengelolaan Ekowisata oleh Perum Perhutani

www.perhutani.co.id Perum Perhutani

AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



Isu Strategis dan Trend Industri Wisata



www.perhutani.co.id Perum Perhutani

AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

6

Ragam Daya Tarik Wisata Perhutani →



AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Wisata Perhutani 2022

Total Obyek Wisata Perhutani | **905 Lokasi**
*) Induk 877 Ecomique 28



Pengunjung Wisata 2022 | **13,4 Juta org**
*) Realisasi 2021 9,6 Juta org

Pendapatan 2022 | **Rp 282,9 M**
*) Realisasi 2021 151,9 M

37 lokasi dikelola Mandiri
868 lokasi dikelola secara Kerjasama

Menyerap Tenaga Kerja **9.043 org**
Pelajar dan Non Pelajar Wisata

Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat **301,9 M**

Rencana Pengembangan Cikole Forest Estate Tourism

The Eco Forest - Retreats, and Event Provider

Latar Belakang

- 1 Kawasan wisata Bandung Utara yang terus berkembang
- 2 Munculnya destinasi baru dengan produk yang identik di dalam kawasan Cikole Jayagiri sehingga berpotensi terjadi persaingan tidak sehat
- 3 Lalu lintas di pintu masuk Cikole Jayagiri yang padat
- 4 Media promosi mitra yang tidak tertata, menjadi kurang estetik
- 5 Transparansi pengelolaan dan pelayanan belum standar

Tujuan

- 1 Penataan Estate Cikole sebagai upaya menangkap peluang pengembangan wisata di wilayah Bandung Utara dan Rebound wisata pasca pandemi-19
- 2 Membuat media komunikasi antara Perhutani, Ecomique dan Mitra (meminimalisir persaingan)
- 3 Menata dan mengatur akses masuk berbasis IT / digitalisasi dan transaksi non tunai (cashless)
- 4 Meningkatkan eye catching area gerbang yang lebih estetik dan atraktif
- 5 Memenuhi fasilitas melalui pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dan menjadikan cikole estate sebagai destinasi wisata one stop shopping
- 6 Mewujudkan transparansi dan standarisasi pelayanan dalam operasional mitra sesuai regulasi
- 7 Meningkatkan jumlah kunjungan, length of stay dan visitor spending wisatawan

Rencana Pengembangan "cikole forest estate tourism"



Luas Penetapan Cluster Cikole **640,25 ha** (SK PHT No. 564/KPTS/Dir/2016)
 • Luas Pengelolaan → 124,61 ha
 • Selsish (Potensial pengembangan) → 515,64 ha

A. ZONA KAWASAN & BUKITAN UTARA	B. ZONA SELF AREA	C. ZONA ZONASI MENDAK
• Cikole Jaya Giri	• WKS	• Sa Tramping
• LRT Jaya Giri	• ML 14	• Long Land
• Baboon	• Widyadharma	• Dendel Forest
• Galuh Cikole	• Sa Lantai	• Hutan Dendel Park
• Airan Panas	• Sa Bando	• Sungai Prisa
• Jaka 025	• Kamping Ngaji	• Saupa Huta
		• Slopang

Prospect: Elaborasi Zonasi

D. ZONA KAWASAN	W. ZONA ZONASI BUKITAN
• Hutan perikanan	• Hutan Tabak
• Lembang Lembang	• Hutan Bukit Jati & Lembang Hutan



Pengembangan Gerbang Cikole Estate



Jembatan dengan konstruksi alam (bambu yang diawetkan) sebagai antisipasi udara vulkanik yang korosif
Referensi : Gadua Bamboo Bridge Colombia



Rest Area Forest Oasis





ASEAN
INDONESIA
2023

Lampiran



www.perhutani.co.id @ Perum Perhutani

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



ASEAN
INDONESIA
2023

Tanggapan Pertanyaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat pada Masa Persidangan V tahun Sidang 2022-2023



www.perhutani.co.id @ Perum Perhutani

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



No.	Pertanyaan Komisi VI DPR RI	Tanggapan / Jawaban Perum Perhutani																																																																																																																																																										
1	2	3																																																																																																																																																										
1	Bagaimana kinerja korporasi dan keuangan Perum Perhutani dalam 3 Tahun terakhir?	<p>Kinerja korporasi dan keuangan Perum Perhutani dalam 3 Tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat baik dengan hasil audited 2022 dari sisi Pendapatan sebesar 5,43 T (105% yoy) dan Laba Bersih sebesar Rp 550,3 M (129% yoy) serta Tingkat Kesehatan "Sehat A."</p> <p>Secara lebih lengkap kami sampaikan rincian kinerja korporasi dan keuangan sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th rowspan="2">Sat</th> <th rowspan="2">2020</th> <th rowspan="2">2021</th> <th rowspan="2">2022</th> <th colspan="2">Perubahan yoy</th> <th rowspan="2">Kat</th> </tr> <tr> <th>(4-3)</th> <th>(5-4)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanaman</td> <td>ha</td> <td>52.480</td> <td>53.990</td> <td>34.458</td> <td>103%</td> <td>64%</td> <td>Pada tahun 2022 terjadi penundaan tanam pada lokasi berproduksi masuk KHDPK</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan</td> <td>ha</td> <td>112.189</td> <td>115.508</td> <td>128.299</td> <td>102%</td> <td>109%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dendaan Hutan</td> <td>ha</td> <td>101.633</td> <td>84.272</td> <td>86.864</td> <td>83%</td> <td>103%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produk Kayu</td> <td>m3</td> <td>848.508</td> <td>886.184</td> <td>928.787</td> <td>117%</td> <td>84%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produk Getah Pinus</td> <td>ton</td> <td>82.357</td> <td>85.121</td> <td>86.907</td> <td>102%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revenue</td> <td>Rp M</td> <td>4.524,3</td> <td>5.185,1</td> <td>5.438,1</td> <td>114%</td> <td>105%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Labai Bersih</td> <td>Rp M</td> <td>214,0</td> <td>427,9</td> <td>550,3</td> <td>200%</td> <td>129%</td> <td>Sebagaimana hasil audited oleh PwC atas perubahan tarif PPh Badan, Laba Bersih 2020 dengan memperhitungkan manfaat pajak langganh sebesar Rp 554 M menjadi Rp 748 M</td> </tr> <tr> <td>EBITDA</td> <td>Rp M</td> <td>322,0</td> <td>374,1</td> <td>638,0</td> <td>262%</td> <td>73%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Aset</td> <td>Rp M</td> <td>18.844,0</td> <td>17.045,0</td> <td>17.500,0</td> <td>102%</td> <td>102%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontribusi Finansial Kepada Negara</td> <td>Rp M</td> <td>643,5</td> <td>749,0</td> <td>876,3</td> <td>117%</td> <td>117%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- PSDH</td> <td>Rp M</td> <td>71,5</td> <td>77,8</td> <td>76,3</td> <td>102%</td> <td>98%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pajak</td> <td>Rp M</td> <td>549,6</td> <td>670,9</td> <td>797,3</td> <td>122%</td> <td>111%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Dividen</td> <td>Rp M</td> <td>20,8</td> <td>-</td> <td>50,0</td> <td>0%</td> <td>5000%</td> <td>Pada bulan Juli 2023 bayar dividen Rp 100 M atas laba audited 2022</td> </tr> <tr> <td>- Restitusi dll</td> <td>Rp M</td> <td>1,8</td> <td>1,3</td> <td>2,8</td> <td>73%</td> <td>206%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kesehatan</td> <td></td> <td>Sehat A</td> <td>Sehat A</td> <td>Sehat A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opini Auditor</td> <td></td> <td>Wajar Dalam Semua Hal Yang Material</td> <td>Wajar Dalam Semua Hal Yang Material</td> <td>Wajar Dalam Semua Hal Yang Material</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auditor</td> <td></td> <td>PwC</td> <td>BY</td> <td>BY</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	Sat	2020	2021	2022	Perubahan yoy		Kat	(4-3)	(5-4)	1	2	3	4	5	6	7	8	Tanaman	ha	52.480	53.990	34.458	103%	64%	Pada tahun 2022 terjadi penundaan tanam pada lokasi berproduksi masuk KHDPK	Pemeliharaan	ha	112.189	115.508	128.299	102%	109%		Dendaan Hutan	ha	101.633	84.272	86.864	83%	103%		Produk Kayu	m3	848.508	886.184	928.787	117%	84%		Produk Getah Pinus	ton	82.357	85.121	86.907	102%	100%		Revenue	Rp M	4.524,3	5.185,1	5.438,1	114%	105%		Labai Bersih	Rp M	214,0	427,9	550,3	200%	129%	Sebagaimana hasil audited oleh PwC atas perubahan tarif PPh Badan, Laba Bersih 2020 dengan memperhitungkan manfaat pajak langganh sebesar Rp 554 M menjadi Rp 748 M	EBITDA	Rp M	322,0	374,1	638,0	262%	73%		Total Aset	Rp M	18.844,0	17.045,0	17.500,0	102%	102%		Kontribusi Finansial Kepada Negara	Rp M	643,5	749,0	876,3	117%	117%		- PSDH	Rp M	71,5	77,8	76,3	102%	98%		- Pajak	Rp M	549,6	670,9	797,3	122%	111%		- Dividen	Rp M	20,8	-	50,0	0%	5000%	Pada bulan Juli 2023 bayar dividen Rp 100 M atas laba audited 2022	- Restitusi dll	Rp M	1,8	1,3	2,8	73%	206%		Tingkat Kesehatan		Sehat A	Sehat A	Sehat A				Opini Auditor		Wajar Dalam Semua Hal Yang Material	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material				Auditor		PwC	BY	BY			
URAIAN	Sat	2020						2021	2022		Perubahan yoy		Kat																																																																																																																																															
			(4-3)	(5-4)																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																					
Tanaman	ha	52.480	53.990	34.458	103%	64%	Pada tahun 2022 terjadi penundaan tanam pada lokasi berproduksi masuk KHDPK																																																																																																																																																					
Pemeliharaan	ha	112.189	115.508	128.299	102%	109%																																																																																																																																																						
Dendaan Hutan	ha	101.633	84.272	86.864	83%	103%																																																																																																																																																						
Produk Kayu	m3	848.508	886.184	928.787	117%	84%																																																																																																																																																						
Produk Getah Pinus	ton	82.357	85.121	86.907	102%	100%																																																																																																																																																						
Revenue	Rp M	4.524,3	5.185,1	5.438,1	114%	105%																																																																																																																																																						
Labai Bersih	Rp M	214,0	427,9	550,3	200%	129%	Sebagaimana hasil audited oleh PwC atas perubahan tarif PPh Badan, Laba Bersih 2020 dengan memperhitungkan manfaat pajak langganh sebesar Rp 554 M menjadi Rp 748 M																																																																																																																																																					
EBITDA	Rp M	322,0	374,1	638,0	262%	73%																																																																																																																																																						
Total Aset	Rp M	18.844,0	17.045,0	17.500,0	102%	102%																																																																																																																																																						
Kontribusi Finansial Kepada Negara	Rp M	643,5	749,0	876,3	117%	117%																																																																																																																																																						
- PSDH	Rp M	71,5	77,8	76,3	102%	98%																																																																																																																																																						
- Pajak	Rp M	549,6	670,9	797,3	122%	111%																																																																																																																																																						
- Dividen	Rp M	20,8	-	50,0	0%	5000%	Pada bulan Juli 2023 bayar dividen Rp 100 M atas laba audited 2022																																																																																																																																																					
- Restitusi dll	Rp M	1,8	1,3	2,8	73%	206%																																																																																																																																																						
Tingkat Kesehatan		Sehat A	Sehat A	Sehat A																																																																																																																																																								
Opini Auditor		Wajar Dalam Semua Hal Yang Material	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material																																																																																																																																																								
Auditor		PwC	BY	BY																																																																																																																																																								

No.	Pertanyaan Komisi VI DPR RI	Tanggapan / Jawaban Perum Perhutani
1	2	3
2	Bagaimana upaya korporasi dalam meningkatkan pendapatan dari pengelolaan hutan?	<p>Dalam upaya korporasi meningkatkan pendapatan dari pengelolaan hutan, selain melakukan optimalisasi dari eksisting bisnis utama Perhutani yaitu Produksi Kayu dan Sadapan Getah Pinus yang nantinya akan dijual dalam bentuk Log kayu dan produk Gondorukem, Terperint dan Derivatifnya (GTD), sejak 2020 Perum Perhutani telah menjalankan 10 proyek strategis yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja korporasi, <u>update 10 Proyek strategis tersebut pada tahun 2023</u> adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hutan Sosial - Platform Kemitraan Sosial → merupakan mandatory SDU 88 proyek Strategis BUNM, telah tersusun aplikasi mobileapp "SocioForest"; 2) Implementasi Smart KPH → merupakan Pengembangan KPH berbasis pada teknologi/digitalisasi yang meliputi aspek redesign RPKH, sistem insentif, transformasi PHBM dan peningkatan nilai tambah; 3) Empowering Anak Perusahaan → Pasca Merger Anak Perusahaan di tahun 2022, tahun 2023 ini dilanjutkan Spin Off Bisnis Induk ke Anak Perusahaan sesuai dengan target RJPP yaitu melanjutkan alih kelola wisata kepada PT.Palawi Risorsis, memulai alih kelola Industri Kayu kepada PT.Inhutani I, dan alih kelola Industri Hasi Hutan Bukan Kayu kepada PT.Inhutani V; 4) Modernisasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) → melalui digitalisasi pengelolaan warehouse kayu di 6 TPK (2 TPK / Divre); 5) New Factory dan Komersialisasi Produk Biomassa → kami akan membangun pabrik biomassa untuk co-firing PLTU PLN di Sukabumi dan Rembang serta Pabrik untuk komersialisasi wood pellet di Brumbung Semarang; 6) Pengembangan Proyek Nature Based Solutions (NBS) → tambahan FS untuk 2 lokasi (sai tubu dan mera'ang) sehingga total menjadi 5 lokasi; 7) Pengembangan Agroforestry Tebu Kelola Mandiri → target tanam Tebu sd. 2023 seluas 11.331 Ha terdiri dari Kelola mandiri perhutani sd. th 2023 seluas 7.000 Ha (2021 =574 Ha, 2022 =1.758 Ha, 2023 =4.668 Ha) dan Tanaman tebu kelola kerjasama th. 2023 seluas 4.331 ha; 8) Digitalisasi Perencanaan SDH → Inventarisasi dan Monitoring SDH untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data perencanaan SDH menggunakan teknologi terkini berbasis Drone dan Aplikasi Interpretasi hasilnya (menjadi kerjasama dg KATAM dan LIDAR); 9) Implementasi digitalisasi untuk pemetaan dan pengamanan SDH → Integrasi Control Room di Kantor Pusat, Kantor Divre dan KPH dalam rangka pengembangan SMART KPH untuk perbaikan tata kelola di tingkat unit manajemen; 10) Integrasi ERP Perhutani → (FICO, HCMS, MM, SD, PP dan E-Procurement). <p>Sebagai tambahan informasi selain proyek strategis tersebut setiap proses bisnis Perum Perhutani mulai dari hulu (perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan) sampai dengan hilir (pemanfaatan hasil hutan) dilakukan dengan mengoptimalkan 3 aspek pengelolaan yaitu Planet (ekologi), People (sosial) dan Profit (ekonomi).</p> <p>Dalam pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani telah mendapatkan sertifikasi yang bersifat mandatory dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan 2) Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); <p>serta sertifikasi yang bersifat voluntary dan berlaku secara internasional berupa sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) Forest Management dan FSC Controlled wood, yang menunjukkan Perum Perhutani telah mengelola sumber daya hutan secara lestari dan bertanggungjawab.</p>



ASEAN
INDONESIA
2023



TERIMA KASIH



www.perhutani.co.id Perum Perhutani

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
TTD.**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berfoto bersama se usai diskusi pendalaman



Diskusi pendalaman Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Jajaran Direksi PTPN VIII dan Perum Perhutani di Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Pimpinan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Aria Bima memberikan masukan dan tanggapan atas paparan yang disajikan Direksi PTPN VIII dan Perum Perhutani



Pertukaran plakat kenang-kenangan antara Tim Knspek Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Jajaran Direksi PTPN VIII.****